

Research Article

## Praktik Pengembangan Kurikulum di Indonesia sebagai Refleksi dalam Upaya Pengembangan Kurikulum Pendidikan

Muhammad Rifqi Zam Zami<sup>1</sup>, Ma'ruf Syifa'udin<sup>2</sup>, Roshifah Jauhari<sup>3</sup>, Sari Hernawati<sup>4</sup>

1. Universitas Wahid Hasyim, Semarang, [rifqizami.id@gmail.com](mailto:rifqizami.id@gmail.com)
2. Universitas Wahid Hasyim, Semarang, [Marufsyifaudin21@gmail.com](mailto:Marufsyifaudin21@gmail.com)
3. Universitas Wahid Hasyim, Semarang, [Roshifahj@gmail.com](mailto:Roshifahj@gmail.com)
4. Universitas Wahid Hasyim, Semarang, [sari\\_hernawati@unwahas.ac.id](mailto:sari_hernawati@unwahas.ac.id)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : January 12, 2025  
Accepted : February 18, 2025

Revised : January 29, 2025  
Available online : March 01, 2025

**How to Cite:** Muhammad Rifqi Zam Zami, Ma'ruf Syifa'udin, Roshifah Jauhari, and Sari Hernawati. 2025. "Praktik Pengembangan Kurikulum Di Indonesia Sebagai Refleksi Dalam Upaya Pengembangan Kurikulum Pendidikan". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11 (1):44-62. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v11i1.1278](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1278).

**Abstract:** This article discusses the history and practice of curriculum development that occurred in Indonesia during 78 years of independence. The importance of this study on curriculum development practices in Indonesia is to see and analyze curriculum development that occurs in Indonesia as an effort to develop educational curricula, especially in educational units or educational institutions. The research method that the author used for this research is the qualitative research method of library research. The object of study lies in the history and practice of curriculum development in Indonesia. The hope of this research is an awareness of the importance of developing educational curricula that must be implemented by educational units in the era of the Independent Curriculum. The development of the educational curriculum must be based on social aspects and several factors that influence it without ruling out matters related to the process of developing an educational curriculum. Hopefully, the educational process in educational units can be carried out properly to realize quality humans and can follow the flow of globalization development.

**Keywords:** Curriculum Development, Curriculum Development in Indonesia, Education Curriculum Development Efforts.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang sejarah serta praktik pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia selama 78 tahun merdeka. Pentingnya kajian tentang praktik pengembangan kurikulum di

Muhammad Rifqi Zam Zami, Ma'ruf Syifa'udin, Roshifah Jauhari, Sari Hernawati

Indonesia ini adalah untuk melihat dan menganalisa pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia sebagai upaya untuk mengembangkan kurikulum pendidikan, khususnya dalam satuan pendidikan atau sebuah lembaga pendidikan. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif kajian pustaka (*library research*). Objek kajian terletak pada sejarah dan praktik pengembangan kurikulum di Indonesia. Harapan dari penelitian ini adalah kesadaran akan pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan di era Kurikulum Merdeka. Pengembangan kurikulum pendidikan harus didasarkan pada aspek sosial kemasyarakatan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya tanpa mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum pendidikan. Harapannya, proses pendidikan dalam satuan pendidikan dapat terlaksana secara baik untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan dapat mengikuti arus perkembangan globalisasi.

**Kata Kunci:** Pengembangan Kurikulum, Pengembangan Kurikulum di Indonesia, Upaya Pengembangan Kurikulum Pendidikan.

## **PENDAHULUAN**

Kurikulum adalah salah satu bagian terpenting dalam pendidikan. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan dunia pendidikan yang terus mengalami peningkatan dalam berbagai hal, maka proses adaptasi serta pengembangan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan. Kurikulum secara formal telah diterapkan sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, artinya pada zaman penjajahan Belanda kurikulum sudah diterapkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda saat itu (Wahyuni, 2015, p. 231). Salah satu faktor pentingnya kurikulum dalam dunia pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta menjadi pegangan dalam melaksanakan proses pendidikan. Kurikulum merupakan sebuah dasar yang digunakan oleh suatu bangsa untuk menunjukkan karakter suatu bangsa. Masa depan dan bentuk kehidupan suatu bangsa ke depan akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan (Lismina, 2018, p. 1).

Perubahan serta penyempurnaan kurikulum terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Tujuan pendidikan suatu negara juga dapat berubah secara keseluruhan apabila negara tersebut mengalami perubahan kondisi, artinya kurikulum pendidikan sebuah negara juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan kondisi-kondisi lainnya (S. Nasution, 2006, p. 251). Banyak sekali opini yang beredar di masyarakat bahwasanya setiap terjadi pergantian menteri akan mengganti kurikulum yang berlaku di Indonesia. Anggapan tersebut belum tentu sepenuhnya benar karena perkembangan segala lini yang ada di Indonesia pastinya akan mempengaruhi perubahan kurikulum. Usaha pemerintah dalam mendukung tujuan kemerdekaan dan termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa" bukanlah sebuah tujuan yang dapat dilakukan secara serta merta mengingat negara Indonesia adalah sebuah negara yang masyarakatnya memiliki perbedaan latar belakang, baik dari sisi kebudayaan, suku, ras dan agama.

Berbagai usaha pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tujuan kemerdekaan telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang pendidikan. Pergantian serta proses pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia semenjak pascakemerdekaan sampai sekarang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam usaha "mencerdaskan kehidupan bangsa". Oleh karena pentingnya kurikulum dalam menentukan arah serta masa depan suatu bangsa, maka keniscayaan pengembangan

kurikulum pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Perkembangan seluruh aspek akan mempengaruhi arah serta tujuan pendidikan, pada akhirnya harus ada langkah serta kebijakan yang tepat dalam proses serta upaya pengembangan kurikulum pendidikan. Praktik pengembangan kurikulum yang telah terjadi selama Indonesia merdeka merupakan sejarah kurikulum yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikan. Terutama usaha atau upaya pengelola satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum di era Kurikulum Merdeka.

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

*"Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik"*

Oleh karena itu, penulis merasa penting kiranya melihat sejarah pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia untuk mengambil hikmah serta pelajaran dalam menentukan pengembangan kurikulum pendidikan. Utamanya praktik pengembangan kurikulum pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di era Kurikulum Merdeka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif kajian pustaka (*library research*). Metode penelitian ini dilaksanakan dengan cara mencari data serta informasi dari dokumen-dokumen seperti majalah, buku, jurnal, dan lain sebagainya (Arikunto, 1997, p. 149). Melaksanakan pengumpulan data dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder dari beberapa buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini adalah teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data serta penjelasan yang rinci dari pembahasan tema dalam penulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perubahan Kurikulum adalah Sebuah Keniscayaan**

Kurikulum adalah program pendidikan yang dibuat oleh lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah yang membahas semua bidang yang berdampak pada pengembangan dan pembentukan kepribadian siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup siswa, baik di dalam maupun di luar kelas (Saputra et al., 2021, p. 2).

Perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan karena pengaruh perkembangan zaman serta seluruh kondisi yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Dengan perubahan tersebut, maka kebutuhan serta arah tujuan pendidikan secara otomatis akan mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum merupakan rentetan sejarah yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dalam perjalanannya selalu mengalami perubahan. Walaupun kurikulum yang ada di Indonesia selalu berganti tetapi pada dasarnya tujuan dari kurikulum adalah sama yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa" (Aslan and Wahyudin, 2020, p. 47-48).

Kurikulum yang selalu berubah tidak hanya sebatas kepentingan dari pemangku kebijakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan serta pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia (Insani, 2019, p. 46), di antaranya adalah:

1. Kompetisi serta persaingan hidup antar bangsa. Kompetisi ini tidak hanya terjadi pada bidang ekonomi tetapi mencakup segala aspek dalam kehidupan bangsa termasuk di dalamnya adalah aspek budaya serta ideologi.
2. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan serta tantangan nilai-nilai moral dan agama.
3. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Teknologi saat ini tidak hanya terbatas dalam permasalahan-permasalahan ahli teknologi, tetapi menyangkut permasalahan etika dan estetika yang membutuhkan reinterpretasi dan rekontekstualisasi kebijakan.
4. Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat melawan arus globalisasi sehingga harus mempersiapkan langkah-langkah antisipatif dan produktif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan serta pengembangan kurikulum tersebut adalah tantangan yang tidak hanya menjadi fokus perhatian pemerintah sebagai pemangku kebijakan, tetapi pemerhati pendidikan yang ada pada tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah/madrasah juga harus memiliki langkah-langkah dalam menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman di era Kurikulum Merdeka. Pada akhirnya pemerhati pendidikan di lingkungan satuan pendidikan tidak hanya merdeka dalam hal mengikuti arus perkembangan zaman, tetapi dapat mengadaptasikan kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pada akhirnya, pengembangan dan reformasi kurikulum harus dilaksanakan karena dengan terus menggunakan kurikulum yang ada saat ini akan merugikan anak-anak dan membatasi kemampuan kurikulum tersebut untuk digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan.

### **Pengembangan Kurikulum**

Proses pengembangan desain kurikulum yang komprehensif, terfokus, dan terpandu dikenal sebagai pengembangan kurikulum. Cara setiap elemen situasional dipilih dan diatur di dalam proses pembelajaran terkait dengan proses tersebut. Untuk mendukung proses pembelajaran, hal ini mencakup pembuatan manajemen kurikulum serta panduan tujuan, mata pelajaran, aktivitas, sumber daya, dan alat ukur pengembangan kurikulum yang disarankan yang terkait dengan berbagai sumber daya unit, rencana unit, dan berbagai jalur pelajaran kurikulum lainnya. (Hamalik, 2009, p. 183).

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan perencana (*planner*), pelaksana (*actor*), penilai (*evaluator*) dan pengembang (*developer*) kurikulum sebenarnya. Kurikulum merupakan alat yang diharapkan mampu untuk memberikan dasar, isi, serta menjadi acuan dan pedoman untuk mengembangkan kompetensi siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat (Sukmadinata, 2011, p. 150).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan kurikulum adalah sebuah proses atau upaya perencanaan kurikulum yang disusun dengan konsep dan dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara optimal.

### **Prinsip dan Model Pengembangan Kurikulum**

Prinsip adalah sebuah pernyataan fundamental yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir serta bertindak. Prinsip merupakan ruh dalam proses perubahan serta pengembangan yang didasari dari pengalaman maupun pemaknaan dalam suatu objek atau subjek tertentu. Tidak terlepas dari upaya dalam menggapai tujuan pendidikan, proses pengembangan kurikulum harus didasari dengan prinsip agar pelaksanaan pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik dan bijaksana. Berikut adalah beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum (Idi, 2007, pp. 179–183):

1. Prinsip Relevansi, merupakan kesesuaian dan keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pendidikan dan lingkungan kehidupan peserta didik, baik kehidupan yang dialami pada masa sekarang dan yang akan datang serta keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja hingga perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
2. Prinsip Efektivitas, adalah prinsip yang digunakan dalam upaya pencapaian kesesuaian perencanaan kurikulum pendidikan dengan keinginan yang ditentukan.
3. Menurut prinsip efisiensi, faktor-faktor seperti usaha, biaya, waktu, dan tenaga dapat mendukung program pendidikan secara optimal dan memberikan hasil yang terbaik jika diberikan pertimbangan yang matang..
4. Konsep kesinambungan menyatakan bahwa ada hubungan antara program pendidikan, bidang studi, dan tingkat pendidikan.
5. Menurut konsep fleksibel, ada ruang gerak yang dapat memberikan kebebasan memilih. Guru dapat membuat program pendidikan mereka sendiri dan mengikuti panduan untuk tujuan dan sumber daya pembelajaran.
6. Menurut prinsip yang berorientasi pada tujuan, memilih materi dilakukan setelah menentukan tujuan. Kegiatan dan jam pelajaran yang dilakukan guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan dipengaruhi oleh prinsip ini.

Ada banyak model yang berbeda untuk mengembangkan kurikulum, dan model pengembangan kurikulum adalah model yang menekankan pada metode tertentu untuk membuat, menerapkan, dan menilai kurikulum. Ada keuntungan dan kerugian dalam menggunakan model pengembangan yang berbeda ketika membuat kurikulum. Namun, tidak perlu khawatir tentang masalah ini karena keberhasilan kurikulum benar-benar ditentukan oleh bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan selama proses pembelajaran (Suratno, Sari, and Bani, 2022, p. 69).

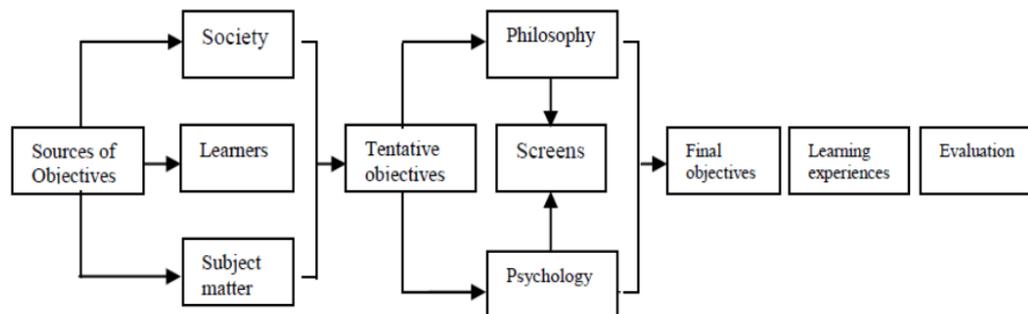
#### *1. Tyler's Behavioral Model*

Untuk membuat rencana kurikulum untuk kegiatan belajar siswa, Ralph Tyler mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama, apa tujuan pendidikan? Dapatkah tujuan tersebut dicapai melalui pengalaman dan penerapan materi yang dipelajari? Apakah mungkin untuk merencanakan pelaksanaan dan

Muhammad Rifqi Zam Zami, Ma'ruf Syifa'udin, Roshifah Jauhari, Sari Hernawati

proses pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien? Bagaimana cara memastikan bahwa tujuan tersebut telah tercapai?

Pertanyaan yang diungkapkan tersebut bisa menjadi formulasi dalam langkah-langkah serta proses kegiatan dan menghasilkan bagan kerja konseptual yang dikembangkan oleh Tyler (Suratno et al., 2022, p. 69–70).



Bagan 1. Formulasi *Tyler's Behavioral Model*

## 2. *Beauchamp's Managerial Model*

George Beauchamp menciptakan model pengembangan kurikulum ini, yang terdiri dari lima langkah pengembangan (Suratno et al., 2022, p. 70–71), yaitu:

- Menetapkan lingkup wilayah pengembangan. Hal ini merupakan wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijakan.
- Penetapan personalia.
- Menetapkan manajemen organisasi serta prosedur pengembangan kurikulum.
- Penerapan/implementasi kurikulum.
- Penilaian/evaluasi kurikulum.

## 3. *Saylor, Alexander, and Lewi's Administrative Model*

Galen Saylor, dkk. mengadopsi pendekatan *Administrative*, merupakan model pendekatan yang inisiasi dan gagasannya berasal dari seluruh administrator pendidikan serta menggunakan prosedur administrasi. Proses pengembangan kurikulum model *Administrative* ini disebut juga dengan *top down* atau *line staf*, artinya pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh pemangku kebijakan (*top*) dan secara struktural ke bawah mengimplementasikan hasil pengembangan kurikulum tersebut (*down*) (Suratno et al., 2022, p. 71). Dari keterangan tersebut dapat diindikasikan bahwa model pengembangan kurikulum ini bersifat sentralistik.

## 4. *The Grass Roots Model*

Model pengembangan kurikulum *Grass Roots* ini adalah kebalikan dari model *Administrative*. Inisiasi dan gagasannya berasal dari guru-guru yang ada di sekolah/satuan pendidikan. Tim pada satuan pendidikan dapat dibentuk untuk proses pengembangan serta penyempurnaan kurikulum dalam beberapa bagian dan bahkan secara keseluruhan.

Sifat dari model pengembangan kurikulum ini adalah desentralistik, sehingga memungkinkan terjadi kompetisi dalam meningkatkan mutu serta sistem pendidikan (Suratno et al., 2022, p. 71-72).

#### 5. *Taba's Inverted Model*

Hilda Taba created this model for developing curricula. According to Taba, teacher creativity and innovation should be prioritised when developing curricula. Unlike the conventional model, which is deductive, this curriculum development is inductive. The process of developing a curriculum consists of five steps (Suratno et al., 2022, p. 72), yaitu:

- a. berkoordinasi dengan guru untuk merencanakan unit eksperimen.
- b. Menguji unit-unit eksperimen.
- c. Mengatur konsolidasi dan revisi.
- d. pembuatan seluruh struktur kurikulum.
- e. Pelaksanaan dan distribusi.

#### 6. *The Demonstration Model*

Dalam upaya untuk melaksanakan reformasi kurikulum, sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan para ahli memulai metodologi pengembangan kurikulum ini. Pendekatan pembuatan kurikulum ini biasanya digunakan dalam skala yang sederhana, yang melibatkan satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau setiap komponen kurikulum.

#### 7. *Roger's Interpersonal Relation Model*

Ada perbedaan antara metode pengembangan kurikulum yang lain dengan metode yang diciptakan oleh Roger. Yang ada hanyalah serangkaian kegiatan kelompok dan bukan kurikulum tertulis. Elemen yang paling penting dalam pembuatan kurikulum ini adalah hubungan dan kegiatan itu sendiri, karena melalui inilah individu-individu yang ada akan diubah. (Suratno et al., 2022, p. 72-73).

Terdapat empat langkah dalam model pengembangan kurikulum *Roger's Interpersonal Relation* ini:

- a. Pemilihan target sistem sekolah.
- b. Partisipasi guru dalam kegiatan kelompok yang intens.
- c. Pembuatan program kelompok yang ketat untuk satu kelas.
- d. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan kelompok.

#### 8. *The Systemic Action-Research Model*

Model pengembangan kurikulum ini, yang mempertimbangkan keterlibatan orang tua/wali murid, guru, siswa, struktur sistem sekolah, dan pola hubungan interpersonal dan kelompok antara masyarakat dan sekolah, didasarkan pada gagasan bahwa perubahan dalam kurikulum merupakan hasil dari perubahan masyarakat. Tiga prinsip utama dari paradigma pengembangan kurikulum ini adalah otoritas pengetahuan profesional, organisasi sekolah dan masyarakat, dan interaksi manusia (Suratno et al., 2022, p. 74).

Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada penelitian tindakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menguji permasalahan kurikulum secara detail melalui beberapa kegiatan. Dengan dasar kegiatan tersebut kemudian disusun rencana secara

menyeluruh untuk memberikan solusi atas masalah beserta tindakan/kegiatan awal yang akan dilaksanakan.

- b. Penerapan/implementasi dari kebijakan yang diambil dalam kegiatan awal. Kemudian diikuti dengan melaksanakan pengumpulan data serta fakta. Fungsi dari proses pengumpulan data ini antara lain adalah menyajikan data untuk penilaian kegiatan, sebagai bahan dalam memahami problematika/masalah yang terjadi, sebagai bahan untuk menilai kembali serta melakukan modifikasi, dan sebagai bahan untuk melaksanakan proses tindak lanjut.

### **Praktik Pengembangan Kurikulum di Indonesia**

Ada banyak kemajuan dan modifikasi yang dilakukan terhadap kurikulum yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejauh ini. Tujuan utama pendidikan nasional adalah untuk membantu siswa menjadi warga negara yang kompeten dan bermoral yang hidup berbudi luhur, beriman kepada Tuhan, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab (Baedhowi, 2016, p. 171-172).

Tujuan pendidikan yang tercantum adalah tujuan yang terdapat dalam kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan hasil dari tantangan dan kemajuan yang terus berkembang, sehingga upaya untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan dengan keseriusan dan tanggung jawab yang tinggi. Pada akhirnya, pembaharuan kurikulum diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (Aslan and Wahyudin, 2020, p. 187).

#### **1. Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)**

Kurikulum ini adalah sebuah kurikulum pendidikan yang muncul pada masa kemerdekaan Indonesia. Istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*Leer Plan*" yang artinya adalah Rencana Pelajaran. Istilah *Curriculum* pada masa awal kemerdekaan kurang familiar di kalangan masyarakat sehingga belum diaplikasikan sebagai sebuah bahasa dalam sebuah kebijakan. Kurikulum ini memiliki ciri yang sarat akan kepentingan politik karena awalnya proses pendidikan berkiblat pada pendidikan Belanda dan dirubah untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Asas pendidikan ditetapkan dengan dasar Pancasila. Kurikulum 1947 ini baru terealisasi pada tahun 1950 sehingga beberapa kalangan beranggapan bahwa sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia diawali dari Kurikulum 1950. Ada 2 hal yang menjadi fokus pendidikan pada kurikulum ini, *pertama* daftar mata pelajaran dan jam pengajaran, *kedua* garis-garis besar pengajaran (Alhamuddin, 2014, p. 49-50).

Karena kurikulum pada saat itu masih dibentuk oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, isu-isu kognitif tidak terlalu dipentingkan dalam pelaksanaannya. Sistem pendidikan kolonial Belanda digantikan dengan kurikulum 1947. Sistem pendidikan ini lebih menekankan pada karakteristik bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat karena suasana pasca kemerdekaan, yang berarti bahwa masyarakat masih sangat kental dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, penting untuk mendukung proses penekanan pada kesadaran akan kesetaraan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain. Penekanan kurikulum ini adalah pada pendidikan karakter dan kesadaran sosial dan politik. Mata pelajaran yang tercakup

dalam proses pendidikan dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari, dengan penekanan pada komponen praktis dan artistik pendidikan (Alhamuddin, 2014, p. 50).

2. Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952)

Pemerintah Indonesia kemudian memperbaiki Kurikulum 1947, yang merupakan kurikulum sebelumnya, pada tahun 1952. Kurikulum ini dikenal sebagai "Rentjana Pelajaran Terurai 1952" selama periode ini. Kurikulum khusus ini memberikan dasar bagi terciptanya sistem pendidikan nasional. Prinsip utama dari kurikulum 1952 adalah bahwa rencana pelajaran harus mempertimbangkan materi pelajaran sebelum membuat hubungan dengan situasi dunia nyata. Gagasan tujuan kurikulum menunjukkan pembentukan sudut pandang humanis. Tujuan dari pembuatan kurikulum ini adalah agar siswa dapat menyesuaikan konten pelajaran dengan situasi sehari-hari dalam lingkungan apa pun (Asfiati, 2016, p. 28).

Tujuan dan arah yang dibangun pada kurikulum ini adalah sebuah upaya pencapaian keberhasilan dalam mengisi kemerdekaan. Pendidikan diarahkan dalam pendidikan kebangsaan dan menciptakan masyarakat sebagai peserta didik yang memiliki jati diri dan nilai-nilai kebangsaan. Perjuangan tidak lagi melawan penjajah, tetapi mengisi kemerdekaan, menumbuhkan patriotisme, dan memikul tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang kuat (Asfiati, 2016, p. 28–29).

3. Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964)

Pada tahun 1964, kurikulum pendidikan Indonesia disempurnakan dan berganti nama menjadi "Rentjana Pendidikan 1964". Pembelajaran yang dinamis, imajinatif, dan bermanfaat ditetapkan. Strategi pembelajaran gotong royong dipimpin digunakan dalam program ini. (Insani, 2019, p. 49). Unsur-unsur cipta, rasa, karsa, dan moralitas yang dikenal sebagai Pancawardhana, merupakan penekanan utama dari pengembangan siswa. Pancawardhana berkonsentrasi pada lima kategori topik: moral, intelektual, emosional/kreatif, keterampilan, dan pertumbuhan fisik. Sejalan dengan pertumbuhan peserta didik, proses pendidikan memberikan penekanan kuat pada pengetahuan dan aplikasi dunia nyata (Rusdianah and Nurdiansyah, 2020, p. 74).

Tujuan utama Kurikulum 1964 adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme peserta didik. Program Pancawardhana merupakan jalan utama dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Mata pelajaran yang masuk dalam program tersebut merupakan upaya dalam mendidik bangsa untuk menjadikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara (Asfiati, 2016, p. 29).

4. Kurikulum 1968

Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964, yang mewakili rezim Orde Lama, digantikan oleh Kurikulum 1968, yang merupakan hasil dari perombakan kurikulum secara politis. Kurikulum 1968 berusaha untuk mempromosikan keterampilan kognitif dan fisik, moral, karakter, dan pandangan agama selain menghasilkan manusia yang benar, kuat, dan sehat secara fisik. Penekanan pada Pancawardhana digantikan dengan Pembinaan Jiwa Pancasila, yang menggunakan bakat khusus dan pengetahuan dasar sebagai kerangka pelajaran. Perubahan penekanan pada penerapan langsung dan selanjutnya dari UUD 1945 ini kemudian melahirkan kurikulum 1968 (Alhamuddin, 2014, p. 51).

Proses lahirnya Kurikulum 1968 ini adalah sebagai bentuk pertimbangan politik ideologis pemerintahan Orde Baru. Ciri khas struktur kurikulum ini adalah *corellated subject curriculum*, yaitu Kurikulum 1968 berfokus pada materi teoritis dan tidak berkaitan dengan ketentuan objektif di lapangan. Materi yang dipelajari memiliki korelasi dengan materi yang akan dipelajari pada jenjang berikutnya. (Insani, 2019, p. 50).

#### 5. Kurikulum 1975

Pembangunan Nasional yang terjadi pada tahun 1975 menjadi dasar Kurikulum ini. Banyak perubahan terjadi sejak 1969, terutama pada faktor-faktor yang mempengaruhi program dan kebijakan pemerintah (Insani, 2019, p. 50). Kurikulum 1975 adalah sebuah kurikulum yang bersifat sentralistik seperti kurikulum sebelumnya, artinya kurikulum dibuat oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara pendidikan hanya melaksanakannya (Nurhalim, 2018, p. 341).

Pada kurikulum ini, orientasi tujuan digunakan, yang berarti bahwa setiap pembelajaran harus dilakukan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan. Guru harus memahami dan menerapkan semua tujuan tersebut selama proses pembelajaran. Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Agama, dan Ilmu Pengetahuan Sosial diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat yang Pancasila. Pembelajaran dalam kurikulum ini bersifat integratif, artinya setiap mata pelajaran diharapkan mencapai tujuan utama. Dalam kurikulum ini, pendekatan sistem PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional digunakan. pembelajaran merupakan interaksi antar komponen-komponen pembelajaran yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Kurikulum ini dievaluasi pada akhir setiap subbab dan bab (Nurhalim, 2018, pp. 342-343). Kelemahan yang ada pada kurikulum ini adalah penerapan sistem yang terpusat dan menganggap guru yang ada di sekolah terpicil memahami tujuan kurikulum (Huliatunisa, 2022, p. 311).

#### 6. Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan)

Kurikulum 1984 disebut "kurikulum 1975 yang disempurnakan. Model pada kurikulum ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). Tokoh utama lahirnya kurikulum ini adalah Dr. Conny R. Semiawan, yaitu Direktur Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional 1980-1986 sekaligus Rektor IKIP Jakarta (Huliatunisa, 2022, p. 311).

CBSA merupakan metode yang digunakan selama proses pembelajaran dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan fisik dan intelektual masih memungkinkan, keterlibatan ini menekankan pada keterlibatan aktif mental peserta didik. Keaktifan peserta didik di sini tidak menutup atau membatasi keaktifan guru juga, sehingga keduanya sama-sama aktif. Sehingga CBSA memberikan penekanan keaktifan pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran (Nurhalim, 2018, p. 343). Diharapkan peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan.

Konsep CBSA ini sangat bagus secara teoritis dan memberikan hasil positif pada sekolah-sekolah yang diujicobakan, tetapi ketika diimplementasikan secara nasional konsep ini mengalami deviasi dan reduksi. Banyak sekolah tidak dapat menerapkan CBSA karena banyak suasana kegaduhan, tempelan gambar, dan masalah

lainnya. Guru tidak lagi menggunakan model ceramah untuk mengajar, yang menyebabkan banyak penolakan. (Alhamuddin, 2014, p. 52).

#### 7. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 dibuat sebagai upaya untuk menggabungkan kurikulum dari tahun 1975 dan 1984. Metode dan tujuannya dianggap tidak berhasil digabungkan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 menjadi dasar bagi kurikulum 1994. Sistem caturwulan menggantikan sistem semester. Sistem caturwulan membagi tahun menjadi tiga tahap sehingga siswa mendapatkan jumlah pembelajaran yang memadai. Materi pelajaran dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan tugas-tugasnya ditonjolkan dalam tujuan pembelajaran (Insani, 2019, pp. 52-53).

Karena beban nasional dan lokal yang terlalu besar, kritik mulai bermunculan. Kebutuhan muatan lokal berbeda untuk setiap wilayah. Kurikulum 1994 ini menjadi sangat padat karena berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menuntut bahwa topik tertentu harus dimasukkan ke dalam kurikulum. (Alhamuddin, 2014, p. 52).

Prinsip *Link and Match* ditekankan pada sekolah kejuruan seperti STM (Sekolah Teknik Menengah), artinya Pendidikan dan dunia kerja/industri harus berhubungan satu sama lain. Lembaga pendidikan harus memiliki kemampuan untuk menyiapkan karyawan yang kompeten, dan dunia bisnis harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Karena pendidikan dianggap sebagai kepanjangan tangan proses industrialisasi dan tidak memanusiaikan manusia, kritik mulai bermunculan. (Machali, 2014, p. 79). Akhir pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998 diikuti dengan kehadiran Suplemen Kurikulum pada tahun 1999. Namun perubahan hanya terletak pada penggantian beberapa materi pelajaran. (Alhamuddin, 2014, p. 52).

#### 8. Kurikulum 2004 (KBK/Kurikulum Berbasis Kompetensi)

Salah satu cara Kurikulum 1994 berubah adalah dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004). Pemilihan kompetensi yang relevan, pengembangan indikator penilaian untuk mengukur keberhasilan pencapaian kompetensi, dan kemajuan pembelajaran adalah tiga elemen penting dari program pendidikan berbasis kompetensi. KBK dicirikan oleh penekanannya pada variasi, tujuan pembelajaran, dan pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Ada banyak cara dan teknik yang berbeda yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain guru, ada sumber belajar tambahan yang mengandung komponen instruksional. Penilaian menyoroti proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. (Alhamuddin, 2014, pp. 52-53).

Dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi ini, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga memperoleh keterampilan, sikap, minat, dorongan, dan nilai-nilai yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab (Maula et al., 2021, p. 17).

#### 9. Kurikulum 2006 (KTSP/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kurikulum 2006 ini merupakan kelanjutan dari Kurikulum 2004 dan disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pengganti dari

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), oleh karena itu KTSP sering disebut sebagai KBK yang disempurnakan. Masing-masing satuan pendidikan membuat dan menerapkan KTSP, yang merupakan kurikulum operasional. Setiap lembaga pendidikan diberi hak dan otonomi tanpa batas untuk mengembangkan program pendidikan mereka sendiri. Sekolah/ madrasah secara umum memiliki hak dan wewenang untuk membuat kurikulum mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada (Nurhalim, 2018, p. 348). KTSP lahir dari semangat yang muncul karena pemerintah daerah juga merasa memiliki tanggung jawab juga dalam upaya peningkatan pendidikan, sehingga pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja. Pola atau model pengembangan kurikulum ini bersifat desentralisasi (Sanjaya, 2008, p. 128).

Kurikulum ini berbeda dengan kurikulum lainnya dalam beberapa hal. Pertama, KTSP dikembangkan dengan memperhatikan potensi dan kondisi satuan pendidikan, dengan memperhatikan ciri khas, budaya masyarakat, dan keadaan peserta didik. Kedua, di bawah arahan dinas pendidikan kota/kabupaten atau departemen agama, satuan pendidikan dan komite sekolah berkolaborasi untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan kompetensi kelulusan dan kerangka dasar kurikulum. Ketiga, Standar Nasional Pendidikan disebutkan dalam kurikulum. (Mulyasa, 2006, p. 20).

Salah satu faktor yang harus diperhatikan guru ketika menentukan kemampuan belajar adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus sejalan dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kemampuan Dasar (KD). Standar proses harus dirancang dan dikembangkan secara cermat ketika menjabarkan SK dan KD melalui indikator dan pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran, proses, dan isi harus dipenuhi. Sesuai dengan pedoman BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan), penilaian harus mempertimbangkan proporsi komponen kognitif, emosional, dan psikomotorik (Mulyasa, 2006, p. 7).

#### 10. Kurikulum 2013

KTSP dianggap belum sempurna serta masih banyak kekurangan karena perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi dan era digital. Perkembangan teknologi ini mempengaruhi kebiasaan masyarakat, sehingga KTSP mengalami perubahan menjadi Kurikulum 2013 atau sering disebut Kurtilas. Kurikulum 2013 menitikberatkan pada pendidikan karakter yang bertujuan untuk menghasilkan individu yang inovatif, produktif, kreatif, dan berkarakter. Proses dan hasil belajar menghasilkan peserta didik yang memiliki moral baik dan memenuhi standar kompetensi lulusan di setiap satuan pendidikan. (Insani, 2019, p. 58-59).

Dalam rangka mengembangkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter, guru yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 harus memiliki keahlian dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan efektif, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan menetapkan standar keberhasilan (Alhamuddin, 2014, p. 54).

Penekanan pembelajaran yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap sosial spiritual yang sesuai dengan pendidikan agama dan budi pekerti merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu agar peserta didik menjadi manusia yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Machali, 2014, p. 82-83). Sejumlah metode pembelajaran terkena dampak dari perubahan kebijakan Kurikulum 2013, termasuk strategi aktif, pendekatan tematik-integratif, penilaian autentik, dan pendekatan ilmiah. Tujuan dari kebijakan pemerintah ini adalah untuk menghasilkan generasi yang produktif, imajinatif, kreatif, dan afektif, serta mampu memajukan bangsa dan peradaban Indonesia di masa depan (Machali, 2014, p. 91).

- Kurikulum 2013 Revisi 2016

Disrupsi yang disebabkan oleh teknologi informasi mendorong perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Instruksi yang berfokus pada membantu anak-anak mengembangkan otak kiri mereka sudah ketinggalan zaman. Hal ini menjadi dasar bagi reformasi Kurikulum 2013 yang telah selesai pada tahun 2016. Kurikulum ini telah dimodifikasi dan diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan abad ke-21. Hal ini dilakukan untuk memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Sebagai hasilnya, pemerintah bekerja keras untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang kuat dan mampu bersaing dengan tuntutan ekonomi global modern. Pemerintah mengembangkan kurikulum yang fleksibel, dinamis, dan realistis untuk menumbuhkan kreativitas di otak kanan untuk mencapai hal ini. Kurikulum 2013 Revisi merupakan proses modifikasi kurikulum yang memodifikasi konten agar sesuai dengan kerangka Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kurikulum ini sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Nasional (Kurnas), namun Kurikulum 2013 Revisi adalah nama akhir yang diberikan untuknya (Mulyasa, 2018, p. 1).

Revisi kurikulum ini dilaksanakan setelah melakukan kajian, diskusi, dan penilaian terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 selama tiga tahun. Perubahan signifikan terjadi pada Kurikulum 2013 Revisi, di antaranya adalah penekanan pada pembelajaran literasi numerasi, penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran berbasis keunggulan lokal, penyesuaian terhadap muatan kurikulum dan alokasi waktu untuk pembelajaran, serta pengembangan sikap kewirausahaan dan keterampilan hidup (Kertati et al., 2023, p. 131).

## 11. Kurikulum Merdeka

Masa pandemi Covid-19 merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat tidak dapat dengan leluasa melaksanakan aktivitas seperti sebelum adanya pandemi. Pandemi Covid-19 mengakibatkan ketertinggalan dalam segala lini kehidupan manusia, utamanya dalam bidang pendidikan. *Learning Loss* (ketertinggalan pembelajaran) terjadi pada masa pandemi covid-19 sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan pembelajaran. Tiga pilihan kurikulum tersedia: Kurikulum Merdeka, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Kemendikburistik) atau Kurikulum 2013. (Kemendikbud RI,

n.d., p. 9). Kurikulum Merdeka ini berfokus pada kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan kreatif. (Agus and Yusuf, 2022, p. 94).

Karena Kurikulum Merdeka menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, siswa memiliki banyak kesempatan untuk menguasai ide-ide baru dan mengasah keterampilan yang ada. Para guru diizinkan untuk memilih strategi pengajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa mereka dalam kapasitas mereka sebagai fasilitator. Pemerintah telah menetapkan topik khusus yang memandu pengembangan proyek Penguatan Pencapaian Profil Pelajar Pancasila. Topik ini tidak terkait dengan pengetahuan yang diperoleh dalam mata pelajaran tertentu karena tidak terkait dengan tujuan pembelajaran tertentu. Kurikulum ini merupakan kebijakan yang menawarkan sumber daya yang akan digunakan sebagai kurikulum nasional untuk membuat kurikulum untuk satuan Pendidikan (Kemendikbud RI, n.d., p. 9–10).

Pembelajaran yang berpusat pada siswa diprioritaskan dalam Kurikulum Merdeka. Frasa "Merdeka Belajar" menunjukkan hal ini, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih pelajaran yang menarik minat mereka. Dalam situasi ini, sekolah dan madrasah bertanggung jawab untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi entitas pendidikan (Cholilah, Tatuwo, Komariah, and Rosdiana, 2023, p. 59).

Kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya karena menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) yang merupakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013. Siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan intelektual disebut sebagai siswa yang berada di fase dasar, sedangkan siswa yang tidak mengalami hambatan disebut sebagai siswa yang berada di fase pendidikan umum. Kurikulum Merdeka menggunakan satu CP untuk semua peminatan, sedangkan kurikulum sebelumnya menggunakan KI dan KD yang terpisah untuk setiap peminatan (Kemendikbud RI, n.d., p. 29).

### **Upaya Pengembangan Kurikulum Pendidikan**

Kurikulum biasanya didefinisikan sebagai jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa di sekolah, perguruan tinggi, atau madrasah. Namun, lebih dari itu, kurikulum tidak hanya sebatas mata pelajaran saja. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas ini termasuk penentuan pendekatan, strategi, metode, proses, dan evaluasi pembelajaran. (Fauzan and Arifin, 2022, p. 2).

Berdasarkan sejarah dan praktik pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia, terdapat dua model pengembangan kurikulum yang berbeda, yaitu pengembangan kurikulum dengan model sentralistik dan pengembangan kurikulum dengan model desentralistik. Kurikulum dengan desain model sentralistik adalah kurikulum yang sering disebut dengan desain model *Administrative*, yaitu model pengembangan kurikulum dimulai dan dikembangkan oleh pemerintah pusat, kemudian satuan pendidikan hanya menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum dengan desain model desentralistik sering disebut dengan desain model *Grass Roots*, yaitu sekolah atau madrasah adalah tempat awal pelaksanaan pengembangan dalam model pengembangan kurikulum *Grass Roots* ini dimulai.

Dalam desain ini, pemerintah hanya bertanggung jawab untuk memantau dan mendorong satuan pendidikan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan berjalan dan dilaksanakan dengan baik. (Nurhalim, 2018, p. 351). Terdapat satu praktik pengembangan kurikulum yang menggunakan desain model sentralistik semi desentralistik yaitu Kurikulum 1994, hal ini dikarenakan pada kurikulum tersebut terdapat muatan lokal yang disesuaikan dengan daerah masing-masing.

No.	Kurikulum	Model Pengembangan	Garis Besar Kurikulum
1	Kurikulum 1947	<i>Administrative</i>	Mengutamakan sisi kognitif dengan kondisi sosial masyarakat yang masih merasakan semangat perjuangan merebut kemerdekaan.
2	Kurikulum 1952	<i>Administrative</i>	Memahami materi pelajaran dan menghubungkannya ke kehidupan sehari-hari.
3	Kurikulum 1964	<i>Administrative</i>	Penciptaan daya cipta, rasa, karya, dan moral yang dikenal sebagai Pancawardhana.
4	Kurikulum 1968	<i>Administrative</i>	Memperkuat kecerdasan dan keterampilan fisik, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama untuk menjadi manusia Pancasila Sejati.
5	Kurikulum 1975	<i>Administrative</i>	Menciptakan masyarakat yang Pancasila.
6	Kurikulum 1984	<i>Administrative</i>	Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran
7	Kurikulum 1994	<i>Administrative</i>	Mengutamakan materi pelajaran dan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah serta menyelesaikan soal.
8	Kurikulum 2004	<i>Grass Roots</i>	Menekankan pada pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan

No.	Kurikulum	Model Pengembangan	Garis Besar Kurikulum
			pengembangan pembelajaran.
9	Kurikulum 2006	<i>Grass Roots</i>	Setiap satuan pendidikan diberi hak dan otonomi tanpa batas untuk mengembangkan kurikulum yang digunakan.
10	Kurikulum 2013	<i>Grass Roots</i>	Mengutamakan pendidikan karakter dengan tujuan menciptakan individu yang inovatif, produktif, kreatif, dan berkarakter.
	Kurikulum Revisi 2013	<i>Grass Roots</i>	Mengembangkan kreativitas otak kanan melalui kurikulum yang fleksibel, realistik, dan dinamis.
11	Kurikulum Merdeka	<i>Grass Roots</i>	Sebuah pendekatan pembelajaran yang berpusat sepenuhnya pada peserta didik, "Merdeka Belajar" menekankan kemampuan siswa untuk berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan kreatif.

Dari praktik pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia, model pengembangan kurikulum semakin menuju pada arah keberagaman/pluralitas. Selain itu, perbedaan kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah serta kondisi-kondisi lainnya menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan kurikulum yang awalnya dikembangkan secara sentralistik menjadi desentralistik.

Selain itu, pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia adalah wujud usaha pemerintah dalam menghadapi perkembangan zaman. Konsentrasi dalam setiap kurikulum yang dicanangkan merupakan sebuah adaptasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat itu.

Penataan terhadap sistem pendidikan nasional erat kaitannya dengan kualitas pendidikan dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan belajar harus dirancang untuk membekali peserta didik dengan kecakapan hidup. Diharapkan peserta didik di seluruh lini lembaga pendidikan memiliki kemampuan dan keunggulan yang diperlukan untuk bersaing dalam masyarakat. Setiap elemen yang terlibat dalam mencapai tujuan pendidikan harus saling terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah aspek tujuan, siswa, pendidik, kurikulum, manajemen, fasilitas, teknologi, biaya, lingkungan, dan proses evaluasi. (Fauzan and Arifin, 2022, p. 9).

Kurikulum merupakan bagian strategis yang berperan dalam pendidikan formal untuk menghubungkan cita-cita (idealisme) dengan kenyataan yang mengarah pada tujuan pendidikan. Kurikulum dapat menjadi alat sekaligus gambaran dalam melaksanakan praktik pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan sebuah pedoman yang digunakan dalam melaksanakan proses pendidikan (Fauzan and Arifin, 2022, p. 11).

Dilihat dari pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia, secara umum telah menepis anggapan masyarakat yang mengemukakan bahwa “ganti menteri ganti kurikulum”. Pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa merupakan proses pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan usaha yang titik berat perubahannya didasarkan pada kondisi bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Selain itu, tercatat bahwa pergantian menteri pendidikan yang terjadi dari awal masa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini adalah sebanyak 37 kali dan perubahan kurikulum terjadi hanya 11 kali selama masa kemerdekaan Indonesia 78 tahun.

## **KESIMPULAN**

Kurikulum merupakan salah satu hal terpenting dalam proses pendidikan, karena kurikulum merupakan sebuah pedoman dalam melaksanakan proses pendidikan untuk mengarah pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Sejarah serta praktik pengembangan kurikulum di Indonesia adalah sebuah catatan yang dapat digunakan sebagai refleksi dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikan. Karena perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan, maka pemerhati pendidikan dari tingkat pusat hingga tingkat satuan pendidikan harus peka terhadap perubahan tatanan sosial kemasyarakatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Hal tersebut dikarenakan, bentuk pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan.

Seluruh komponen yang berhubungan dengan kurikulum harus terintegrasi agar proses implementasi kurikulum dalam satuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Utamanya dalam mempersiapkan implementasi Kurikulum Merdeka di setiap lembaga atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Pengembangan dan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia tercatat sebanyak 11 kali dari awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Praktik pengembangan kurikulum di Indonesia selalu dilatarbelakangi oleh faktor-faktor, kondisi serta kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu. Hal tersebut secara tidak langsung mematahkan stereotip “ganti menteri ganti kurikulum” seperti opini yang beredar di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, and Yusuf, R. (2022). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. Solok: Insan Cendikia Mandiri.
- Alhamuddin, A. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, 1(2), 48–58.

- Arikunto, S. (1997). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asfiati. (2016). *Pendekatan Humanis dalam Pengembangan Kurikulum (I)*. Medan: Perdana Publishing.
- Aslan, and Wahyudin. (2020). *Kurikulum dalam Tantangan Perubahan*. Medan: Bookies Indonesia.
- Baedhowi, B. (2016). KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP): KEBIJAKAN DAN HARAPAN. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(65), 171–181. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i65.323>
- Cholilah, M., Tatuwo, A. G. P., Komariah, and Rosdiana, S. P. (2023). Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(02), 56–67. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.110>
- Fauzan, and Arifin, F. (2022). *Desain Kurikulum dan Pembelajaran Abad 21 (1st ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Hamalik, O. (2009). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Huliatunisa, Y. (2022). *Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar*. Sukabumi: CV Jejak.
- Idi, A. (2007). Pengembangan Kurikulum. *Teori Dan Praktik*.
- Insani, F. D. (2019). SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Kemendikbud RI. (n.d.). *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*.
- Kertati, I., Harsoyo, Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., ... Wirasati, W. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik (dari Hulu ke Hilir)* (Efitra, Ed.). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lismina. (2018). *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi (I)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Machali, I. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71–94. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>
- Maula, I., Awe, E. Y., Azhari, J. F., Fitriana, E., Fahmi, I., Nasution, R., and Qodat, A. (2021). *Kurikulum Pendidikan*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2018). *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi* (B. S. Fatmawati, Ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhalim, M. (2018). Analisis Perkembangan Kurikulum di Indonesia (Sebuah Tinjauan Desain Dan Pendekatan). *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16(3), 339–356. <https://doi.org/10.24090/insania.v16i3.1597>
- Rusdianah, L., and Nurdiansyah, N. (2020). Analisis Kurikulum Berdasarkan Kebijakan. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 9(2), 68–89.
- S. Nasution. (2006). *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muhammad Rifqi Zam Zami, Ma'ruf Syifa'udin, Roshifah Jauhari, Sari Hernawati

- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saputra, M., Nazaruddin, Na'im, Z., Syahidin, Nugroho, P., Maula, I., ... Dahniar. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Rusnawati, Ed.). Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suratno, J., Sari, D. P., and Bani, A. (2022). Kurikulum dan Model-model Pengembangannya. *Jurnal Pendidikan Guru Matematika*, 2(1).
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum dari masa ke masa (telaah atas pentahapan kurikulum pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 10(2), 231-242.